

**TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS HAK POLITIK DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HTN/HAN



Disusun Oleh :

Dafid Mayangsari

201920127

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana
Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

HTN/HAN

OLEH :

Nama : DAFID MAYANGSARI

NIM : 201920127

Kudus, 5 Februari 2024

Disetujui,

Pembimbing I,



Lidya Christina Wardhani SH., MH., M.Kn

Pembimbing II,




Adissya Mega Christia, SH., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, SH., Mhum

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dafid Mayangsari
NIM : 201920127
Alamat : Jepara, Jawa Tengah
Judul Skripsi : TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS HAK POLITIK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing ;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akadeik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,


Dafid Mayangsari

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” (Imam Syafi’i)

“Pendidikan bukan tentang mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran.” (B.Yeats)

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal yaitu merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, taqwa dan yakin kepada Allah.” (Imam

Syafi’i)

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang paling kucintai;
2. Suamiku tercinta;
3. Saudaraku yang terkasih;
4. Teman-teman seperjuanganku;
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS HAK POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Ibu Lidya Christina Wardhani, SH., MH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Adissya Mega Christia, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;

5. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah banyak membantu penulis;
6. Kedua orang tuaku yang paling kucinta karena dengan doa dan dukungan beliau, penulis dapat menambuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
7. Suamiku tercinta yang selalu memberikan doa dan menguatkan penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik;
8. Saudaraku yang kukasihi dan memberikan suasana ceria dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis tidak mudah jenuh dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Temanku Adel yang selalu membantu dan menyemangati penulis, sehingga penulis mampu melalui fase ini dengan baik;
10. Rekan-rekan seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang banyak memberikan cerita dan kesan selama perkuliahan;
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan

senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 5 Februari 2024

Dafid Mayangsari



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Konstitusionalitas Hak Politik Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Indonesia” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan konstitusionalitas hak politik dalam UU ASN di Indonesia serta latar belakang terjadinya pelanggaran oleh UU ASN terhadap konstitusi di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Metode penentuan data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang kemudian akan diperiksa, diedit dan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembatasan hak politik ASN dalam UU ASN bertentangan dengan konstitusi namun bertujuan untuk menjaga netralitas ASN. Sesuai atau tidaknya suatu peraturan hanya dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, pelanggaran UU ASN terhadap konstitusi dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor ego sektoral, kepentingan pribadi, ketidaksesuaian dengan ideologi dan ketidaktahuan. Dari beberapa kasus dalam penelitian ini, diketahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran UU ASN oleh Para ASN adalah kepentingan pribadi.

Kata Kunci : ASN, Hak Politik, Konstitusionalitas.

ABSTRACT

The research with the title “Overview Of The Constitutionality of Political Rights In Law No.5 of 2014 Concerning State Civil Apparatus In Indoneia”, in general aims to find out and understand the constitutionality of political rights in the ASN Law in Indonesia as well as the background to violations by the ASN Law against the constitution in Indonesia.

The research method used is normative juridical with qualitative descriptive specifications. The data determination method used secondary data consisting of primary legal materials and secondary materials. Methods of data collection using carried out through document study which are then examined, edited and analyzed qualitatively.

Based on the research results, it is known that regulation of ASN polirical rights in the ASN Law is contrary to the constitution but aims to maintain ASN neutrality. Whether a regulation is appropriate or not can only be assessed by the Constitutional Court. Then, violations of the ASN Law against the constitution were motivated by several factors such as sectoral ego, personal interests, incompatibility with ideology and ignorance.

Keywords : ASN, Political Right, Constitutionality.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK SKRIPSI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Konstitusionalitas.....	13
2. Hak Politik	18
3. Aparatur Sipil Negara	21
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Metode Penentuan Data	27
4. Metode Pengumpulan Data.....	28
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	28

6. Metode Analisis Data.....	29
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
1. Tinjauan Konstitusionalitas Hak Politik Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Indonesia	30
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Konstitusi di Indonesia	53
BAB V	68
PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Pelanggaran Oleh ASN	10
Tabel 2. Kasus Pelanggaran Hak Politik Oleh ASN.....	44
Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Kelima Kasus	52

